

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini karena lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai pengatur sumber-sumber ekonomi dan juga sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan antara pihak surplus atau kelebihan dana dengan pihak defisit atau membutuhkan dana. Peran ini menjadikan lembaga keuangan salah satu penopang perekonomian yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.

Lembaga keuangan dengan basis syariah kini banyak bermunculan seiring dengan minat masyarakat yang mulai menerapkan transaksi keuangan bebas riba. Sehingga lembaga keuangan dengan basis syariah pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Tingkat volume dan nilai transaksi berbasis syariah pun ikut meningkat selama tiga dekade ini. Tentu ini menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan akuntansi yang berbasis syariah.

Secara umum akuntansi syariah dapat diartikan melalui dua kata pembentuknya, yaitu kata akuntansi dan syariah. akuntansi adalah indentifikasi transaksi yang diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan, pengertian dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat

diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>1</sup>

Akuntansi syariah pada dasarnya termasuk dalam bentuk penerapan dari nilai-nilai islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan namun juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Akuntansi dalam islam merupakan alat untuk menjalankan perintah Allah SWT untuk melakukan pencatatan terkait dengan transaksi yang dilakukan suatu badan usaha.<sup>2</sup>

Sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam QS 2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Baitul Mal wat Tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam ruang lingkup mikro. BMT mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan

<sup>1</sup> Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat. 2014), hlm. 3

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 80

dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariat Islam.<sup>3</sup>

Lembaga baitul mal wat tamwil ini didirikan dengan tujuan dapat menjangkau masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPRS Syariah. Berbeda dengan bank syariah BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang memiliki sifat tidak *bankable*.

Dalam menjalankan aktivitasnya BMT haruslah dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip responsibilitas, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima serta dipercaya oleh anggotanya atau masyarakat. Supaya operasional BMT dapat berjalan dengan lancar dan tertib administrasi, maka dalam kegiatan BMT perlu adanya perangkat yang terkait dengan dana yang dihimpun dan juga dikelola oleh BMT berupa sistem informasi akuntansi yang baik dan benar. Sistem informasi akuntansi yang baik dan benar merupakan sistem yang efektif bagi manajemen BMT dalam menjalankan usahanya.

Sebuah sistem informasi akuntansi yang efektif dapat memberikan Informasi catatan keuangan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*). Informasi catatan keuangan dihasilkan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh BMT yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam

---

<sup>3</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2017), hlm. 316

laporan keuangan ini menyajikan informasi keuangan guna menilai kinerja dan mengetahui kondisi keuangan suatu BMT.

Pada BMT, laporan keuangan dibuat dengan tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas BMT yang bermanfaat bagi manajemen dalam rangka membuat perencanaan, pengukuran kinerja, dan sebagai acuan pengambilan keputusan strategis. Laporan keuangan juga disajikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan dana terhadap para anggota.

Kualitas dari laporan keuangan dapat dilihat dari terpenuhi karakteristik-karakteristik suatu laporan keuangan dalam penyajiannya. Karakteristik tersebut diantaranya dapat dipahami, relevan, memiliki keandalan dan dapat dibandingkan. Jika memenuhi ke-empat karakteristik tersebut maka suatu laporan dapat dikatakan berguna bagi pemakainya.<sup>4</sup> Apabila kualitas informasi akuntansi keuangan suatu BMT baik, maka akan memberikan keuntungan yang penting bagi manajemen dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap BMT.

Supaya dalam penyusunan laporan keuangan dapat memenuhi kualitas informasi akuntansi keuangan, maka akuntan mengesahkan seperangkat standar dan prosedur umum yang disebut *Generally Accepted Accounting Principles* disingkat dengan GAAP. GAAP di Indonesia sendiri berupa pernyataan-pernyataan yang telah dirangkum dalam Standar Akuntansi

---

<sup>4</sup> Sri Nurhayati, dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat. 2014), hlm. 100

Keuangan (SAK). Standar ini berisi kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) yang dijadikan pedoman dasar penyusunan dalam penyajian laporan keuangan pada setiap perusahaan.

Sehubung dengan adanya Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, menegaskan bahwa perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yaitu mengikuti pedoman standar akuntansi keuangan syariah.<sup>5</sup> Karena BMT merupakan salah satu koperasi dengan basis syariah, maka dalam penyajian laporan keuangannya menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah, yang berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

PSAK 101 mengatur penyajian secara wajar posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah, sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai. Penyajian laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 101 terdiri dari komponen-komponen laporan keuangan yang lengkap, meliputi; (1) Neraca; (2) Laporan Laba Rugi; (3) Laporan Arus Kas; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; (5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat; (6)

---

<sup>5</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor:91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Keuangan Syariah, pasal 33 ayat 1, hlm. 24

Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan dan (7) Catatan atas Laporan keuangan.<sup>6</sup>

KSPPS BMT Al-Bina adalah salah satu BMT di Tasikmalaya yang berbadan hukum koperasi. Seperti koperasi syariah pada umumnya BMT Al-Bina juga melakukan pencatatan akuntansi guna melihat kinerja intansi selama satu periode dan tanggungjawab para pengurus kepada investor serta para anggota yang telah menghimpun dananya di BMT Al Bina.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Koperasi Syariah dalam menyajikan laporan keuangannya berpedoman pada PSAK 101. Oleh karena itu BMT Al-Bina yang juga perlu menerapkan PSAK 101 pada penyajian laporan keuangannya. Namun pada praktiknya penulis mendapatkan beberapa permasalahan terkait dengan penyajian laporan keuangan yang ada di BMT Al-Bina;

Meskipun pengurus sudah menerima pelatihan terkait akuntansi syariah, namun pada penyusunan laporan keuangan masih terlihat mengacu pada PSAK 27 Tahun 2009. Pada laporan Keuangan BMT Al-Bina juga hanya terdapat Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan untuk Laporan Arus Kas BMT sering kali tidak disusun, serta BMT Al-Bina juga tidak menyusun Laporan Sumber Penggunaan Dana Zakat dan Laporan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan yang merupakan komponen yang ada di PSAK 101. Selain itu, pada neraca keuangan BMT Al-Bina juga ditemukan, penggabungan antara pos Dana

---

<sup>6</sup> DSAKS IAI, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: IAI, 2017), hlm 3

Syirkah Temporer dengan pos Kewajiban yang seharusnya pada PSAK 101 dipisahkan.<sup>7</sup>

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan serta melihat dari urgensi atau pentingnya penyajian laporan keuangan yang efektif bagi suatu entitas syariah, serta sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh mengenai Implementasi PSAK 101 pada Penyajian Laporan Keuangan di KSPPS BMT Al-Bina, Cipedes, Tasikmalaya.

#### **B Rumusan Masalah**

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah diatas. Maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana implementasi PSAK 101 pada laporan keuangan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya?

#### **C Tujuan Penelitian**

Ditinjau dari poin-poin rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk; Mengetahui implementasi PSAK 101 pada laporan keuangan di KSPPS BMT Al-Bina

#### **D Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dudung, Manajer BMT Al-Bina

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, agar dapat diaplikasikan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang ada di entitas syariah yang terkait pada penelitian ini.

2. Bagi Praktisi

Dapat memberikan informasi mengenai penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK, agar kedepannya dapat diimplementasikan dengan baik sehingga informasi yang ada pada laporan keuangan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Bagi Akademisi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan masukan terhadap penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan laporan keuangan.